

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Teori Legitimasi

Legitimacy theory menjelaskan bahwa organisasi secara kontinu akan beroperasi sesuai dengan batas-batas dan nilai yang diterima oleh masyarakat di sekitar perusahaan dalam usaha untuk mendapatkan legitimasi. Berdasarkan teori ini, perusahaan dapat beroperasi dengan izin masyarakat, di mana izin tersebut tidak bersifat tetap sehingga perusahaan harus dapat beradaptasi terhadap keinginan dan tuntutan masyarakat. O'Donovan (2002) dalam Nor Hadi (2011:87) berpendapat bahwa legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan begitu legitimasi merupakan manfaat atau sumber daya potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup.

Gray et.al,(1996) dalam Nor Hadi (2011:8) berpendapat bahwa legitimasi merupakan:

“...a systems-oriented view of organization and society... permits us to focus on the role of information and disclosure in the relationship between organization,, the state, individuals and group”.

Definisi di atas menjelaskan bahwa legitimasi merupakan sistem yang berorientasi pada keberpihakan masyarakat, pemerintah, individu, dan kelompok masyarakat dimana perusahaan harus sejalan dengan harapan masyarakat.

Deegan, Robin dan Tobin (2002) dalam Nor Hadi (2011:89) menyatakan bahwa: “Legitimasi dapat diperoleh manakala terdapat kesesuaian antara keberadaan perusahaan tidak mengganggu atau sesuai (*congruent*) dengan eksistensi sistem nilai yang ada dalam masyarakat dan lingkungan. Ketika terjadi pergeseran yang menuju ketidaksesuaian, maka pada saat itu legitimasi perusahaan dapat terancam.”

Legitimacy theory suatu perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat dan bagaimana perusahaan menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk melegitimasi tindakan perusahaan yang salah satunya adalah pengungkapan *sustainability report* sebagai perwujudan dari legitimasi di dunia bisnis.

2.1.2 Teori Stakeholder

Stanford Research Institut (SRI) adalah lembaga yang pertama kali menggunakan konsep *stakeholder*. Lembaga ini mendefinisikan *stakeholders* sebagai kelompok yang mampu memberikan dukungan terhadap keberadaan sebuah organisasi. *Stakeholder* adalah semua pihak, internal maupun eksternal, yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. *Stakeholder is a group or an individual who can affect, or be affected by, the success or failure of an organization* (Luk, Yau, Tse, Alan, Sin, Leo, dan Raymond, dalam Nor Hadi. 2011 : 93). Dengan demikian, *stakeholder* merupakan pihak internal maupun eksternal, seperti : pemerintah, perusahaan pesaing, masyarakat sekitar, lingkungan internasional, lembaga diluar perusahaan

(LSM dan sejenisnya), lembaga pemerhati lingkungan, para pekerja perusahaan, kaum minoritas dan lain sebagainya yang keberadaannya sangat mempengaruhi dan dipengaruhi perusahaan .

Perusahaan tidak hanya sekedar bertanggung jawab terhadap para pemilik (*Shareholder*) sebagaimana terjadi selama ini, namun bergeser menjadi lebih luas yaitu pada ranah sosial kemasyarakatan (*stakeholder*), selanjutnya disebut tanggung jawab sosial (*Social responsibility*). Fenomena seperti ini terjadi, karena adanya tuntutan dari masyarakat akibat *negative externalities* yang timbul serta ketimpangan sosial yang terjadi (Harahap, 2002) dalam Nor Hadi (2011:93). Untuk itu, tanggung jawab perusahaan yang semula hanya di ukur sebatas pada indikator ekonomi (*economic focused*) dalam laporan keuangan, kini harus bergeser dengan memperhitungkan faktor-faktor sosial (*social dimentions*) terhadap *stakeholder*, baik internal maupun eksternal. Selain itu, Jones, Thomas, dan Andrew (1999) dalam Nor Hadi (2011:94) menyatakan bahwa pada hakikatnya *stakeholder theory* mendasarkan diri pada asumsi, antara lain :

1. *The corporation has relationship many constituency groups (stakeholders) that effect and are affected by its decisions.*
2. *The theory is concerned with nature of these relationship in terms of both processes and outcomes for the firm and its stakeholder.*
3. *The interest of all (legitimate) stakeholder have intristic value, and no set of interest is assumed to dominate the others.*
4. *The theory focuses on managerial decission making.*

Perusahaan tidak dapat melepaskan diri dari lingkungan sosial. Perusahaan perlu menjaga legitimasi *stakeholder* serta mendudukkannya dalam kerangka kebijakan dan pengambilan keputusan, sehingga dapat mendukung pencapaian

tujuan perusahaan, yaitu stabilitas usaha dan jaminan *going concern* (Adam, dalam Nor Hadi. 2011: 94-95). Dalam pengambilan keputusan, para *stakeholder* membutuhkan informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terkait dengan aktivitas yang telah dilakukan. Perusahaan akan berusaha untuk mengungkapkan informasi yang berintegritas, agar para *stakeholder* tetap menaruh kepercayaan terhadap perusahaan. Menurut sifatnya pengungkapan informasi dibagi menjadi dua, yaitu wajib (*mandatory*) dan sukarela (*voluntary*). Pengungkapan informasi yang bersifat wajib adalah laporan keuangan, informasi ini dibutuhkan oleh *stakeholder* yang mempengaruhi maupun yang dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi perusahaan. Sedangkan pengungkapan yang bersifat sukarela dibutuhkan oleh *stakeholder* yang berpengaruh maupun tidak berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi perusahaan.

Laporan sukarela yang sedang berkembang saat ini adalah *sustainability report* (laporan keberlanjutan). Melalui pengungkapan *sustainability report* (pengungkapan sosial dan lingkungan) perusahaan dapat memberikan informasi yang lebih cukup dan lengkap berkaitan dengan kegiatan dan pengaruhnya terhadap kondisi sosial masyarakat dan lingkungan.

2.1.3 Profitabilitas

2.1.3.1 Definisi Profitabilitas

Profitabilitas merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi tingkat profitabilitas, maka semakin rinci informasi yang disampaikan manajer dalam

memberikan informasi kepada para *stakeholder*, hal ini berguna untuk meyakinkan *stakeholder* perusahaan. Beberapa penelitian mengungkapkan adanya hubungan antara profitabilitas dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Profitabilitas merupakan hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan perusahaan, dan merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (Fauzan: 2012).

Menurut Kasmir (2013:114) menyatakan bahwa:

“Rasio Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan investasi.”

Agus Sartono (2010:122) menyatakan bahwa:

“Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba baik dalam hubungannya dengan penjualan, assets maupun laba bagi modal sendiri”.

Jati (dalam Suryono dan Prastiwi, 2011) menyatakan bahwa:

“Profitabilitas merupakan kebebasan dan fleksibilitas yang diberikan kepada manajemen untuk melakukan dan mengungkapkan tanggung jawab sosial secara luas kepada para pemegang saham, sehingga semakin tinggi tingkat profitabilitas maka akan semakin tinggi pula luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Tingkat profitabilitas yang tinggi pada perusahaan akan meningkatkan daya saing antar perusahaan. Perusahaan yang mempunyai profit tinggi, cenderung akan membuka cabang atau lini baru sehingga dapat memperbesar keuntungan investasi atau membuka investasi baru terkait dengan perusahaan induknya. “

Berdasarkan uraian di atas, menurut pemahaman penulis pengertian Profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu.

2.1.3.2 Tujuan Penggunaan Profitabilitas

Tujuan dari penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan menurut Kasmir (2012:197):

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

2.1.3.3 Manfaat Penggunaan Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas memiliki manfaat tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Sementara itu manfaat yang diperoleh dari rasio profitabilitas menurut Kasmir (2012:198) adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
2. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
3. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan laba sendiri.
4. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

2.1.3.4 Metode Pengukuran Profitabilitas

Ada beberapa rumus yang biasa dipergunakan untuk mengukur rasio *profitabilitas*. (Martono dan Harjito, 2010:59), sebagai berikut:

1. *Gross Profit Margin*

Merupakan perbandingan penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan dengan penjualan bersih atau rasio antara laba kotor dengan penjualan bersih. Rumus yang digunakan untuk menghitung *gross profit margin*:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Penjualan Bersih} - \text{Harga Pokok}}{\text{Penjualan bersih}}$$

2. *Net Profit Margin*

Margin laba bersih merupakan keuntungan penjualan setelah menghitung seluruh biaya dan pajak penghasilan. Margin ini menunjukkan perbandingan laba bersih setelah pajak dengan penjualan.

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Penjualan bersih}}$$

3. *Return On Investment atau Return On Assets*

Rasio ROI atau ROA menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva (*assets*) yang dipergunakan.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

4. *Return On Equity*

Return on Equity (ROE) atau sering disebut Rentabilitas Modal Sendiri dimaksudkan untuk mengukur seberapa banyak keuntungan yang menjadi hak pemilik modal sendiri.

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Modal Sendiri}}$$

Rasio profitabilitas digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba, melalui rasio inilah investor dapat mengetahui tingkat

pengembalian dari investasinya. Rasio profitabilitas yang sering digunakan yaitu *Return on Assets (ROA)*, *Return on Investment (ROI)*, *Return on Equity (ROE)*, *Gross Profit Margin* dan *Net Profit Margin*.

Perusahaan dapat menggunakan rasio profitabilitas secara keseluruhan atau hanya sebagian saja dari jenis rasio profitabilitas yang ada. Penggunaan rasio secara sebagian berarti bahwa perusahaan hanya menggunakan beberapa jenis rasio saja yang memang dianggap perlu diketahui. Hery (2016:193).

Dari semua rasio profitabilitas, penulis hanya akan menggunakan rasio *Return On Asset (ROA)*, karena mengacu pada profitabilitas (*profitability*) dan efisiensi operasional (*operational efficiency*). ROA sering digunakan untuk membandingkan performa bisnis dibandingkan kompetitor dan industri sejenis. ROA dihitung dengan cara: Penghasilan bersih / total aset. Dimana total aset adalah gabungan antara utang (*liability*) dan modal (*equity*).

2.1.4 Ukuran Perusahaan

2.1.4.1 Definisi Ukuran Perusahaan

Ukuran suatu perusahaan dapat mempengaruhi luas pengungkapan informasi perusahaan. Secara umum perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak daripada perusahaan kecil. Perusahaan besar umumnya memiliki jumlah aktiva yang besar, penjualan besar, karyawan yang banyak, sistem informasi yang canggih, jenis produk yang banyak, dan struktur kepemilikan yang lengkap, sehingga membutuhkan tingkat pengungkapan secara luas. Perusahaan

besar mempunyai biaya informasi yang rendah, kompleksitas dan dasar kepemilikan yang lebih luas dibanding perusahaan kecil sehingga perusahaan besar cenderung mengungkapkan informasi yang lebih luas.

Ukuran perusahaan merupakan variabel yang banyak digunakan untuk menjelaskan pengungkapan sosial yang dilakukan perusahaan dalam laporan tahunan yang dibuat. Secara umum perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak daripada perusahaan kecil. Secara teoritis perusahaan besar tidak akan lepas dari tekanan politis, yaitu tekanan untuk melakukan pertanggungjawaban sosial. Dengan mengungkapkan kepedulian pada lingkungan melalui pelaporan keuangan, maka perusahaan dalam jangka waktu panjang bisa terhindar dari biaya yang sangat besar akibat dari tuntutan masyarakat.

Ukuran perusahaan dapat diukur dari aset yang dimiliki perusahaan. Aset adalah sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Perusahaan yang besar, umumnya memiliki jumlah aset yang besar pula.. Menurut Lech (2013: 57) ukuran perusahaan dapat ditunjukkan dengan total aset, jumlah pegawai dan total penjualan. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini dapat dilihat dari total aset. Aset atau aktiva adalah sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat usaha dikemudian hari. Aset adalah manfaat ekonomi dimasa depan yang mungkin diperoleh di masa depan, atau dikendalikan oleh perusahaan tertentu sebagai hasil transaksi atau kejadian masa lalu, Kieso, et al (2008, h.193). Total aset adalah keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan besar umumnya memiliki jumlah aktiva yang besar.

Ukuran perusahaan menurut Hartono (2015:254) adalah:

“Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aktiva besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aktiva”

Menurut Riyanto (2013:313) ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

“Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai equity, nilai penjualan atau nilai aktiva”

Menurut Consoladi *et al.* dalam Heni Oktaviani (2014) mengatakan bahwa:

“Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi kinerja sosial perusahaan karena perusahaan yang besar mempunyai pandangan yang lebih jauh, sehingga lebih berpartisipasi dalam menumbuhkan kinerja sosial perusahaan”

Berdasarkan uraian di atas, menurut pemahaman penulis pengertian Ukuran Perusahaan adalah suatu skala yang menggambarkan besar kecilnya perusahaan dengan berbagai nilai seperti *equity*, penjualan, dan aset perusahaan, semakin besar nilai tersebut mencerminkan perusahaan yang semakin kuat atau besar.

2.1.4.2 Metode Pengukuran Ukuran Perusahaan

Menurut Harahap (2007: 23) pengukuran ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

“Ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural (Ln) dari rata-rata total aktiva (*total assets*) perusahaan. Penggunaan total aktiva berdasarkan pertimbangan bahwa total aktiva mencerminkan ukuran perusahaan dan diduga mempengaruhi ketepatan waktu”.

Menurut Hartono (2013:282) rumus perhitungan ukuran perusahaan adalah:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Log Total Aktiva}$$

2.1.5 Komite Audit

2.1.5.1 Pengertian Komite Audit

Menurut Arents (2010), menjelaskan pengertian komite audit adalah:

“Umumnya komite audit terdiri dari tiga atau lima kadang tujuh orang yang bukan bagian dari manajemen perusahaan. Tujuan dibentuknya komite audit yaitu untuk menjadi penengah antara auditor dan manajemen perusahaan apabila terjadi perselisihan.”

Sedangkan menurut Peraturan Nomor IX.1.5 dalam lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-29/PM/2004 mengemukakan bahwa :

“Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya”.

Pada umumnya, komite audit mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang, yaitu:

1. Laporan Keuangan

Komite audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan yang dibuat manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usaha, rencana, dan komitmen perusahaan jangka panjang.

2. Tata Kelola Perusahaan

Komite audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku dan etika, melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan.

3. Pengawasan Perusahaan

Komite Audit bertanggung jawab untuk pengawasan perusahaan termasuk di dalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan auditor internal.

Komite Audit beranggotakan satu atau lebih anggota Dewan Komisaris. Komite Audit harus diketuai oleh seorang Komisaris Independen (Surat Keputusan Ketua Bapepam Kep-29/PM/2004). Anggota Komite Audit diharuskan memiliki keahlian yang memadai. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Kep-29/PM/2004 menyatakan bahwa anggota komite audit harus:

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai dengan pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Salah seorang dari anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan;
3. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan;
4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Komite audit dituntut untuk bertindak secara independen karena komite audit merupakan pihak yang menjembatani antara eksternal auditor dan perusahaan

dan juga menjembatani antara fungsi pengawasan dewan komisaris dengan internal auditor (Surya dan Yustivandana, 2006). Komite audit harus bebas dari pengaruh direksi, eksternal auditor dan hanya bertanggung jawab terhadap Dewan Komisaris (Hasnati, 2003 dalam Surya dan Yustivandana, 2006).

Berdasarkan uraian di atas, menurut pemahaman penulis pengertian Komite Audit adalah pihak yang menjembatani antara auditor dan manajemen perusahaan, komite audit bertindak secara independen dan harus bebas pengaruh direksi, eksternal auditor dan hanya bertanggungjawab terhadap dewan komisaris.

2.1.5.2 Metode Pengukuran Komite Audit

Menurut Robert Jao (2011), komite audit diukur menggunakan:

$$\text{Komite Audit} = \text{Jumlah Anggota Rapat dalam Satu Tahun}$$

Sedangkan menurut Pujiningsih (2011), komite audit dapat diukur menggunakan:

$$\text{Komite Audit} = \text{Jumlah Anggota Komite Audit di Perusahaan}$$

Rumus di atas berfungsi untuk menjelaskan jumlah komite audit yang ada di perusahaan. Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep- 41/PM/2003 yang menyatakan bahwa ukuran keanggotaan komite audit adalah sebagai berikut:

“Ukuran keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, di antaranya merupakan komisaris independen perusahaan tercatat yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit, sedangkan

anggota lainnya merupakan pihak ekstern yang independen di mana sekurang-kurangnya satu di antaranya memiliki kemampuan dibidang akuntansi dan atau keuangan. Pertimbangan anggota komite audit berjumlah lebih dari satu orang disebabkan agar antar anggota komite audit dapat saling bertukar pikiran dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam membantu dewan komisaris”.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit menjelaskan ukuran komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.

2.1.6 Pengungkapan *Sustainability Report*

2.1.6.1 Pembangunan Keberlanjutan (*Sustainable Development*)

Brutland report merupakan suatu dokumen awal yang membahas mengenai konsep awal dari *sustainability*. Dokumen tersebut membahas mengenai dua masalah utama yakni pembangunan dan lingkungan. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai kebutuhan versus sumber daya, atau sebagai jangka panjang versus jangka pendek. Pengertian *sustainability* yang diadopsi dari United Nations (dalam *Agenda for Development*) yakni pembangunan yang wawasan multidimensional dalam mencapai kualitas hidup yang lebih tinggi.

Pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan terhadap lingkungan akan saling tergantung dan memperkuat komponen-komponen yang ada pada pembangunan berkelanjutan Adapun tujuan dari *sustainable development* adalah menyeimbangkan antara dua kepentingan sekaligus, yaitu pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Dua tujuan ini saling mendukung dan tidak

dapat berdiri sendiri. *Sustainable development* tercapai ketika perusahaan telah berpijak dalam konsep *triple bottom line*.

Pembangunan yang sekarang sedang marak adalah pembangunan yang hanya bersifat sementara. Dengan tuntutan globalisasi, Indonesia mengikuti perkembangan jaman tanpa melihat prospek kedepan. Perkembangan masyarakat yang serba instan dan asal jadi, budaya konsumtif telah mendarah daging pada sebagian besar masyarakat Indonesia. Sedang sebenarnya, hakikat pembangunan adalah pembangunan yang berkelanjutan yang tidak parsial, instan dan pembangunan kulit. Maka, dengan adanya konsep *Sustainable Development* yang kemudian disebut SD akan berusaha memberikan wacana baru mengenai pentingnya melestarikan lingkungan alam demi masa depan, generasi yang akan datang.

Laporan keberlanjutan (*sustainability report*) berbeda dengan laporan keuangan. Selain sebagai pendukung pembangunan berkelanjutan, laporan ini diungkapkan sebagai bentuk komitmen perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan di sekitar perusahaan berada. *Sustainability report* menjadi media informasi bagi para *stakeholder* internal maupun eksternal untuk menilai apakah manajemen suatu perusahaan sudah menjalankan apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Jadi, adanya *sustainability report* sebagai pelengkap laporan keuangan perusahaan sangatlah penting bagi para *stakeholder* maupun perusahaan itu sendiri.

Sebuah laporan keberlanjutan harus menyediakan gambaran yang berimbang dan masuk akal dari kinerja keberlanjutan sebuah organisasi, baik kontribusi yang positif maupun negatif terhadap lingkungan, masyarakat dan ekonomi. Pelaporan keberlanjutan merupakan proses yang membantu organisasi dalam menetapkan sasaran, mengukur kinerja, dan mengelola perubahan terhadap ekonomi global berkelanjutan. Pelaporan keberlanjutan merupakan salah satu yang menggabungkan profitabilitas jangka panjang dan tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap lingkungan.

Menurut GRI (2013) pelaporan berkelanjutan dapat membantu organisasi untuk menetapkan tujuan, mengukur kinerja, dan mengelola perubahan dalam rangka membuat operasi mereka lebih berkelanjutan. Sebuah laporan berkelanjutan menyampaikan pengungkapan tentang dampak organisasi baik itu positif maupun negatif terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Dalam upaya mewujudkannya, pelaporan keberlanjutan membuat yang abstrak menjadi nyata dan konkret, sehingga membantu dalam pemahaman dan pengelolaan dampak dari pengembangan keberlanjutan terhadap kegiatan dan strategi organisasi

Sebagai awal munculnya konsep pembangunan berkelanjutan adalah karena perhatian kepada lingkungan. Terutama sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui sedang eksploitasi terhadapnya dilakukan terus menerus. Pengertian dari tidak mengurangi dan mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang adalah pembangunan yang dilakukan dimasa sekarang itu jangan sampai merusak lingkungan, boros terhadap SDA dan juga memperhatikan generasi yang akan

datang. Generasi yang akan datang juga jangan terlalu dimanjakan dengan tersedianya semua fasilitas. Tetapi mereka juga harus di beri kesempatan untuk berekspresi menuangkan ide kreatifnya untuk mengolah dan mengembangkan alam dan pembangunan.

Dari berbagai pengertian pembangunan berkelanjutan diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) adalah sebuah upaya pembangunan yang meliputi aspek ekonomi, sosial, lingkungan bahkan budaya untuk kebutuhan masa kini tetapi tidak mengorbankan atau mengurangi kebutuhan generasi yang akan datang. Meliputi aspek ekonomi, pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana mencari jalan untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang, tanpa menghabiskan modal alam. Namun konsep “pertumbuhan ekonomi” itu sendiri bermasalah, karena sumber daya bumi itu sendiri terbatas.

Aspek sosial, maksudnya pembangunan yang berdimensi pada manusia dalam hal interaksi, interrelasi dan interdependesi. Yang erat kaitannya juga dengan aspek budaya. Tidak hanya pada permasalahan ekonomi, pembangunan berkelanjutan untuk menjaga keberlangsungan budaya dari sebuah masyarakat supaya sebuah masyarakat tetap bisa eksis untuk menjalani kehidupan serta mempunyai sampai masa mendatang.

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang ambigu, dimana pandangan yang luas berada di bawah naungannya. konsep ini memasukkan pemahaman keberlanjutan lemah, keberlanjutan kuat, dan ekologi mendalam.

konsep yang berbeda juga menunjukkan tarik ulur yang kuat antara eko (lingkungan) sentrisme dan antropo (manusia) sentrisme. Oleh karena itu konsep ini lemah didefinisikan dan mengundang debat panjang mengenai definisinya.

2.1.6.2 Konsep *Triple Bottom Line*

Dewasa ini semakin banyak perusahaan yang memperhatikan dan mengukur performa tidak hanya dari sudut finansial saja tetapi juga dari sudut lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Perusahaan dituntut oleh berbagai pihak dari *stakeholder* untuk lebih transparansi dan akuntabel dalam kegiatan yang berhubungan dengan *sustainable* perusahaan. Menurut Harnrunghalotorn (2010:8-11) , istilah *Triple Bottom Line* dipopulerkan oleh John Elkington pada tahun 1997. Perusahaan juga dituntut untuk tidak hanya fokus pada pencapaian *profit*, namun juga fokus pada *people* dan *planet*. Ketiga hal ini sering disebut dengan *triple bottom line*.

1. *Profit*

Setiap perusahaan pasti bertujuan untuk mendapatkan profit. Perusahaan dapat berkelanjutan jika mendapatkan profit secara terus menerus. Dengan profit yang didapatkan perusahaan, perusahaan dapat tetap *going concern*. Namun dalam kenyataannya, saat ini perusahaan tidak dapat *going concern* hanya dengan mengedepankan profit saja, namun juga *people* dan *planet* yang terlibat dalam proses dan dampak atas aktivitas perusahaan yang sering dilalaikan oleh perusahaan.

2. *People*

Perusahaan memerlukan *people* baik investor, karyawan, *supplier*, konsumen, masyarakat, maupun lembaga masyarakat. Perusahaan memerlukan investor untuk mendanai kegiatan operasional perusahaan. Untuk menarik para investor, perusahaan harus dapat memenuhi keinginan investor dan memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi agar para investor tertarik untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan. Karyawan sebagai pendukung proses produksi memerlukan perhatian perusahaan atas pengelolaan lingkungan kerja yang baik. Karyawan memerlukan perhatian atas gaji, pelatihan, pendidikan, dan jaminan-jaminan. Mengelola hubungan yang baik dengan *supplier*, konsumen, dan masyarakat sekitar dapat meningkatkan pencitraan baik bagi perusahaan.

Perusahaan yang memiliki hubungan yang baik dengan *supplier* dapat menumbuhkan rasa kepercayaan dan keterikatan sehingga dapat memperlancar proses pemesanan bahan baku dan pelunasan utang dagang. Hubungan yang baik perusahaan dengan konsumen serta kualitas produk yang baik dapat berdampak pada tingkat loyalitas konsumen terhadap produk-produk perusahaan. Semakin baik hubungan perusahaan dengan konsumen maka akan semakin loyal konsumen tersebut terhadap perusahaan karena merasa diperhatikan dan terlibat dalam kegiatan yang diadakan perusahaan.

Perusahaan dan masyarakat sekitar harusnya dapat berhubungan dengan baik. Kegiatan operasi perusahaan dengan pengelolaan yang tidak baik dapat

mengganggu masyarakat sekitar, masyarakat sekitar yang terusik akan melakukan protes yang dapat menghambat kegiatan operasional perusahaan. Dengan pencitraan baik, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas dan keuntungan yang berlipat. Dengan perusahaan fokus terhadap lingkungan sekitar, berbagai lembaga masyarakat yang peduli terhadap lingkungan hidup akan mendukung kegiatan dan keberlangsungan perusahaan.

3. *Planet*

Perusahaan juga harus memperhatikan *planet* (lingkungan) karena perusahaan dapat beroperasi dengan mengambil sumber daya alam yang ada di dalamnya. Perusahaan yang menggunakan sumber daya alam secara serampangan dapat menyebabkan menipisnya SDA yang ada. Rusaknya lingkungan tidak hanya disebabkan penggunaan SDA secara serampangan, namun juga karena tercemarnya lingkungan sebagai akibat dari kurangnya kemampuan perusahaan untuk mengolah limbah dari kegiatan operasional perusahaan. Kerusakan lingkungan yang berimbas pada ketersediaan SDA sebagai bahan baku produk dapat menurunkan pendapatan perusahaan. Perusahaan harus dapat menggunakan SDA dengan efisien yang memastikan ketersediaan SDA untuk generasi selanjutnya dan mengolah limbah dengan efektif agar lingkungan sekitar tidak tercemar.

2.1.6.3 Definisi *Sustainability Report*

Menurut Fauzan (2012) *sustainability report* berarti laporan yang memuat tidak saja informasi kinerja keuangan, tetapi juga informasi non keuangan yang

terdiri dari informasi aktivitas sosial dan lingkungan yang memungkinkan perusahaan bisa tumbuh secara berkesinambungan (*sustainable performance*).

Sustainability report adalah praktek pengukuran, pengungkapan dan upaya akuntabilitas dari kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan terhadap para *stakeholder* (GRI,2006: 3).

Menurut Effendi (2009:109), laporan keberlanjutan adalah:

“Laporan keberlanjutan (*sustainable report*) yaitu suatu laporan yang bersifat nonfinansial yang dapat dipakai sebagai acuan oleh perusahaan untuk melihat pelaporan dari dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan”. Dari pernyataan ini diusulkan tiga kaidah operasional dalam mendefinisikan keadaan dari *sustainability*:

1. “Sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti ikan, tanah, dan air harus digunakan tidak lebih cepat dari waktu yang dibutuhkan sumber daya alam tersebut untuk diperbarui kembali;
2. Sumber daya alam yang tidak diperbarui seperti bahan bakar dari fosil dan mineral harus digunakan tidak lebih cepat dari kemampuan sumber daya alam yang dapat diperbarui untuk menggantikannya;
3. Polusi dan sampah harus dikeluarkan tidak lebih cepat daripada kemampuan alam untuk menyerapnya, mendaur ulangnya, atau bahkan memusnahkannya.”

Global reporting Initiative (GRI) merupakan salah satu organisasi internasional yang berpusat di Amsterdam Belanda. Aktivitas utamanya difokuskan kepada pencapaian transparansi dan pelaporan suatu perusahaan melalui pengembangan standard dan pedoman pengungkapan *sustainability report* (Imam dan Sekar, 2014:6). *Sustainability report* yang disusun berdasarkan Kerangka Pelaporan GRI mengungkapkan keluaran dan hasil yang terjadi dalam satu periode tertentu. Pelaporan *sustainability report* dibagi menjadi tiga komponen (Alkington (1997) dalam Fauzan, 2012:2) yaitu: Kinerja ekonomi, kinerja sosial dan kinerja

lingkungan.

Berdasarkan uraian di atas, menurut pemahaman penulis pengertian *Sustainability Report* adalah laporan yang memuat tidak hanya informasi kinerja keuangan saja tapi informasi *nonfinancial* yang dapat dipakai sebagai acuan oleh perusahaan untuk melihat pelaporan dari dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan terhadap para *stakeholder*.

2.1.6.4 Manfaat *Sustainability Report*

GRI mempromosikan dan mengembangkan pendekatan standarisasi pelaporan tersebut untuk menanggapi permintaan terhadap informasi yang terdapat pada *sustainability report* yang akan menguntungkan pelaporan perusahaan dan kepada yang menggunakan informasi laporan sejenis. Menurut *World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) (2006) manfaat yang didapat dari *sustainability report* antara lain:

1. *Sustainability report* memberikan informasi kepada *stakeholder* (pemegang saham, anggota komunitas lokal, pemerintah) dan meningkatkan prospek perusahaan, serta membantu mewujudkan transparansi.
2. *Sustainability report* dapat membantu membangun reputasi sebagai alat yang memberikan kontribusi untuk meningkatkan *brand value*, *market share*, dan loyalitas konsumen jangka panjang.
3. *Sustainability report* dapat menjadi cerminan bagaimana perusahaan mengelola risikonya.
4. *Sustainability report* dapat digunakan sebagai stimulasi *leadership thinking* dan *performance* yang didukung dengan semangat kompetisi.
5. *Sustainability report* dapat mengembangkan dan memfasilitasi pengimplementasian dari sistem manajemen yang lebih baik dalam mengelola dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial.
6. *Sustainability report* cenderung mencerminkan secara langsung kemampuan dan kesiapan perusahaan untuk memenuhi keinginan pemegang saham untuk jangka panjang.

7. *Sustainability report* membantu membangun ketertarikan pemegang saham dengan visi jangka panjang dan membantu mendemonstrasikan bagaimana meningkatkan nilai perusahaan yang terkait dengan isu sosial dan lingkungan.

2.1.6.5 Pengungkapan *Sustainability Report*

Pengungkapan informasi sosial perusahaan yang bersifat sukarela (*voluntary disclosure*) adalah pengungkapan *sustainability report*. Dimana masih belum ada peraturan yang mewajibkan pengungkapan *sustainability report* di Indonesia. Hal ini jelas berbeda dengan negara-negara di Eropa, dimana praktik pengungkapan *sustainability report* telah diwajibkan untuk semua sektor perusahaan. Sebagaimana tertulis dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 1 (revisi 1998) paragraf kesembilan:

“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna yang memegang peranan penting.”

Berdasarkan PSAK No.1 (revisi 1998) tersebut, maka perusahaan diharapkan untuk dapat mengungkapkan segala informasi yang berkaitan dengan tindakan sosial dan lingkungan yang dilakukan perusahaan. Hal tersebut diperkuat dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ketentuan yang dimaksud termuat dalam pasal 74 (1) yang berbunyi:” Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan“. Dalam kaitannya dengan *sustainability development*, tidak hanya ada isu tunggal saja yang terdapat di dalamnya melainkan isu ekonomi, isu sosial serta isu lingkungan.

Sebagian besar bentuk pengungkapan *sustainability report* perusahaan diungkapkan melalui website perusahaan, dengan media ini siapa saja dapat mengakses sehingga mereka mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab yang telah dilakukan perusahaan. Berdasarkan pengamatan *sustainability report* mengandung *narrative text*, foto, tabel dan grafik yang memuat penjelasan mengenai pelaksanaan *sustainability* perusahaan.

Sustainability reporting dapat didesain oleh manajemen sebagai cerita retoris untuk membentuk *image* (pencitraan) pemakainya melalui pemakaian *narrative text*. Menurut Sari (2013), untuk mendukung adanya pembangunan berkelanjutan, *sustainability report* digunakan sebagai salah satu media informasi perusahaan kepada *stakeholder* internal maupun eksternal untuk menilai apakah manajemen suatu perusahaan menjalankan apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya.

2.1.6.6 Prinsip-Prinsip Sustainability Report

Sustainability report sebagai pelengkap laporan keuangan perusahaan sangatlah penting bagi para *stakeholder* maupun perusahaan itu sendiri. Adapun prinsip-prinsip menurut GRI adalah sebagai berikut:

1. “Keseimbangan
Sustainability report sebaiknya mengungkapkan aspek positif dan negatif dari kinerja perusahaan untuk dapat memungkinkan penilaian yang masuk akal terhadap keseluruhan kinerja.
2. Dapat Diperbandingkan
Sustainability report berisi isu-isu dan informasi yang ada sebaiknya dipilih, dikumpulkan, dan dilaporkan secara konsisten. Informasi tersebut

harus disajikan dengan saksama sehingga memungkinkan para *stakeholder* untuk menganalisis perubahan kinerja perusahaan dari waktu ke waktu.

3. Kecermatan

Informasi yang dilaporkan dalam *sustainability report* harus cukup akurat dan rinci sehingga memungkinkan pemangku kepentingan untuk menilai kinerja perusahaan.

4. Ketepatan Waktu

Pelaporan *sustainability report* tersebut harus terjadwal serta informasi yang ada harus selalu tersedia bagi para *stakeholder* ketika dibutuhkan dalam mengambil kebijakan.

5. Kesesuaian

Informasi yang diberikan dalam *sustainability report* harus sesuai dengan pedoman dan dapat dimengerti serta dapat diakses oleh *stakeholder*. *Stakeholder* harus dapat menemukan informasi yang diperlukan dengan mudah.

6. Dapat Dipertanggungjawabkan

Informasi dan proses yang digunakan dalam penyusunan laporan harus dikumpulkan, direkam, dikompilasi, dianalisis, dan diungkapkan dengan tepat sehingga dapat menetapkan kualitas dan materialitas informasi dari *sustainability report*.”

2.1.6.7 Indikator Sustainability Report

Sustainability report dapat dinilai dari seberapa banyak indikator-indikator yang dapat diungkapkan dalam laporan tersebut. Semakin banyak indikator yang diungkapkan dalam *sustainability report* maka semakin bagus kualitas dari *sustainability report* tersebut Menurut Khomsiyah (2009:25), *sustainability report* dapat dinilai dari seberapa banyak indikator-indikator yang dapat diungkapkan dalam laporan tersebut.

Semakin banyak indikator yang diungkapkan dalam *sustainability report* maka semakin bagus kualitas dari *sustainability report* tersebut. Pengungkapan *sustainability report* diukur dari pengungkapan yang terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan indikator GRI yang diungkapkan dalam

sustainability report perusahaan. Dalam penelitian ini indikator yang digunakan adalah GRI Guidelines Versi 4 menyebutkan bahwa, perusahaan harus menjelaskan dampak aktivitas perusahaan terhadap ekonomi, lingkungan dan sosial pada bagian standar *disclosure*. *Sustainability report* menggunakan standar dari GRI berisi 6 indikator yaitu:

1. Indikator Kinerja Ekonomi (*economic performance indicator*)
2. Indikator Kinerja Lingkungan (*environment performance indicator*)
3. Indikator Kinerja Tenaga Kerja (*labor practices performance indicator*)
4. Indikator Kinerja Hak Asasi Manusia (*human rights performance indicator*)
5. Indikator Kinerja Sosial (*social performance indicator*)
6. Indikator Kinerja Produk (*product responsibility performance indicator*).

Adapun item yang digunakan dalam pengungkapan *sustainability report* adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Indikator Pengungkapan *Sustainability Report* Berdasarkan GRI-G4

INDIKATOR KINERJA	ASPEK
EKONOMI	<p>Aspek : Kinerja Ekonomi</p> <p>EC1: perolehan dan distribusi nilai ekonomi langsung, meliputi pendapatan, biaya operasi, imbal jasa karyawan, donasi, dan investasi komunitas lainnya, laba ditahan, dan pembayaran kepada penyandang dana serta pemerintah.</p> <p>EC2: Implikasi finansial dan risiko lainnya akibat perubahan iklim serta peluangnya bagi aktivitas organisasi</p> <p>EC3: Jaminan kewajiban organisasi terhadap program imbalan pasti.</p>

INDIKATOR KINERJA	ASPEK
	EC4: Bantuan finansial yang signifikan dari pemerintah.
	Aspek: Kehadiran Pasar
	EC5: Rentang rasio standar upah terendah dibandingkan dengan upah minimum setempat pada lokasi operasi yang signifikan.
	EC6: Kebijakan, praktek, dan proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal pada lokasi operasi yang signifikan.
	EC7: Prosedur penerimaan pegawai lokal dan proporsi manajemen senior lokal yang dipekerjakan pada lokasi operasi yang signifikan.
	Aspek: Dampak Ekonomi Tidak Langsung
	EC8: Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur serta jasa yang diberikan untuk kepentingan publik secara komersial, natura, atau pro bono.
	EC9: Pemahaman dan penjelasan dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk seberapa luas dampaknya.
	LINGKUNGAN
EN 1: Penggunaan Bahan; diperinci berdasarkan berat atau volume.	
EN2: Persentase Penggunaan Bahan Daur Ulang.	
Aspek: Energi	
EN3: Penggunaan Energi Langsung dari Sumber Daya Energi Primer.	

INDIKATOR KINERJA	ASPEK
	EN4: Pemakaian Energi Tidak Langsung berdasarkan Sumber Primer.
	EN5: Penghematan Energi melalui Konservasi dan Peningkatan Efisiensi.
	EN6: Inisiatif untuk mendapatkan produk dan jasa berbasis energi efisien atau energi yang dapat diperbarui, serta pengurangan persyaratan kebutuhan energi sebagai akibat dari inisiatif tersebut.
LINGKUNGAN	EN7: Inisiatif untuk mengurangi konsumsi energi tidak langsung dan pengurangan yang dicapai.
	Aspek: Air
	EN8: Total pengambilan air per sumber.
	EN9: Sumber air yang terpengaruh secara signifikan akibat pengambilan air.
	EN10: Persentase dan total volume air yang digunakan kembali dan didaur ulang.
	Aspek Biodiversitas (Keanekaragaman Hayati)
	EN11: Lokasi dan Ukuran Tanah yang dimiliki, disewa, dikelola oleh organisasi pelapor yang berlokasi di dalam, atau yang berdekatan dengan daerah yang diproteksi (dilindungi?) atau daerah-daerah yang memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi di luar daerah yang diproteksi.
	EN12: Uraian atas berbagai dampak signifikan yang diakibatkan oleh aktivitas, produk, dan jasa organisasi pelapor terhadap keanekaragaman hayati di daerah yang diproteksi (dilindungi) dan di daerah yang memiliki

INDIKATOR KINERJA	ASPEK
	<p>keanekaragaman hayati bernilai tinggi di luar daerah yang diproteksi (dilindungi).</p> <p>EN13: Perlindungan dan Pemulihan Habitat.</p> <p>EN14: Strategi, tindakan, dan rencana mendatang untuk mengelola dampak terhadap keanekaragaman hayati.</p> <p>EN15: Jumlah spesies berdasarkan tingkat risiko kepunahan yang masuk dalam Daftar Merah IUCN (<i>IUCN Red List Species</i>) dan yang masuk dalam daftar konservasi nasional dengan habitat di daerah-daerah yang terkena dampak operasi.</p>
LINGKUNGAN	<p>Aspek: Emisi, Efluen dan Limbah</p> <p>EN16: Jumlah emisi gas rumah kaca yang sifatnya langsung maupun tidak langsung dirinci berdasarkan berat.</p> <p>EN17: Emisi gas rumah kaca tidak langsung lainnya dirinci berdasarkan berat</p> <p>EN18: Inisiatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan pencapaiannya.</p> <p>EN19: Emisi bahan kimia yang merusak lapisan ozon (<i>ozone-depleting substances/ODS</i>) dirinci berdasarkan berat.</p> <p>EN20: NO_x, SO_x dan emisi udara signifikan lainnya yang dirinci berdasarkan jenis dan berat.</p> <p>EN21: Jumlah buangan air menurut kualitas dan tujuan.</p> <p>EN22: Jumlah berat limbah menurut jenis dan metode pembuangan.</p>

INDIKATOR KINERJA	ASPEK
	EN23: Jumlah dan volume tumpahan yang signifikan.
	EN24: Berat limbah yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah yang dianggap berbahaya menurut Lampiran Konvensi Basel I, II, III dan VIII, dan persentase limbah yang diangkut secara internasional.
	EN25: Identitas, ukuran, status proteksi dan nilai keanekaragaman hayati badan air serta habitat terkait yang secara signifikan dipengaruhi oleh pembuangan dan limpasan air organisasi pelapor
	Aspek: Produk dan Jasa
	EN26: Inisiatif untuk mengurangi dampak lingkungan produk dan jasa dan sejauh mana dampak pengurangan tersebut.
	EN27: Persentase produk terjual dan bahan kemasannya yang ditarik menurut kategori.
	Aspek: Kepatuhan
	EN28: Nilai Moneter Denda yang signifikan dan jumlah sanksi non moneter atas pelanggaran terhadap hukum dan regulasi lingkungan.
	Aspek: Pengangkutan/Transportasi
	EN 29: Dampak lingkungan yang signifikan akibat pemindahan produk dan barang-barang lain serta material yang digunakan untuk operasi perusahaan, dan tenaga kerja yang memindahkan.
	Aspek: Menyeluruh

INDIKATOR KINERJA	ASPEK
	EN30: Jumlah pengeluaran untuk proteksi dan investasi lingkungan
TENAGA KERJA	Aspek: Pekerjaan
	LA1: Jumlah angkatan kerja menurut jenis pekerjaan, kontrak pekerjaan, dan wilayah.
	LA2: Jumlah dan tingkat perputaran karyawan menurut kelompok usia, jenis kelamin, dan wilayah.
	LA3: Manfaat yang disediakan bagi karyawan tetap (purna waktu) yang tidak disediakan bagi karyawan tidak tetap (paruh waktu) menurut kegiatan pokoknya. LA15: Rasio Karyawan yang kembali dikerjakan setelah keluar dari perusahaan menurut jenis kelamin
	Aspek: Tenaga kerja / Hubungan Manajemen
	LA4: Persentase karyawan yang dilindungi perjanjian tawar-menawar kolektif tersebut.
	LA5: Masa pemberitahuan minimal tentang perubahan kegiatan penting, termasuk apakah hal itu dijelaskan dalam perjanjian kolektif tersebut.
	Aspek: Kesehatan dan Keselamatan Jabatan
	LA6: Persentase jumlah angkatan kerja yang resmi diwakili dalam panitia Kesehatan dan Keselamatan antara manajemen dan pekerja yang membantu memantau dan memberi nasihat untuk program keselamatan dan kesehatan jabatan.
LA7 : Tingkat kecelakaan fisik, penyakit karena jabatan, hari-hari yang hilang, dan ketidakhadiran, dan jumlah	

INDIKATOR KINERJA	ASPEK
	kematian karena pekerjaan menurut wilayah.
	LA8: Program pendidikan, pelatihan, penyuluhan/bimbingan, pencegahan, pengendalian risiko setempat untuk membantu para karyawan, anggota keluarga dan anggota masyarakat, mengenai penyakit berat/berbahaya.
	LA9: Masalah kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian resmi dengan serikat karyawan
	Aspek: Pelatihan dan Pendidikan
	LA 10: Rata-rata jam pelatihan tiap tahun tiap karyawan menurut kategori/kelompok karyawan.
	LA11: Program untuk pengaturan keterampilan dan pembelajaran sepanjang hayat yang menunjang kelangsungan pekerjaan karyawan dan membantu mereka dalam mengatur akhir karier.
	LA12: Persentase karyawan yang menerima peninjauan kinerja dan pengembangan karier secara teratur.
	Aspek: Keberagaman dan Kesempatan Setara
	LA13: Komposisi badan pengelola/penguasa dan perincian karyawan tiap kategori/kelompok menurut jenis kelamin, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan keanekaragaman indikator lain.
	LA14: Perbandingan/rasio gaji dasar pria terhadap wanita menurut kelompok/kategori karyawan.
HAK ASASI	LA15: Jaminan Kembali Kerja

INDIKATOR KINERJA	ASPEK
MANUSIA	Aspek: Praktik Investasi dan Pengadaan
	HR1: Persentase dan jumlah perjanjian investasi signifikan yang memuat klausul HAM atau telah menjalani proses skrining/ filtrasi terkait dengan aspek hak asasi manusia.
	HR2: Persentase pemasok dan kontraktor signifikan yang telah menjalani proses skrining/ filtrasi atas aspek HAM.
	HR3: Jumlah waktu pelatihan bagi karyawan dalam hal mengenai kebijakan dan serta prosedur terkait dengan aspek HAM yang relevan dengan kegiatan organisasi, termasuk persentase karyawan yang telah menjalani pelatihan.
	Aspek: Non Diskriminasi
	HR4: Jumlah kasus diskriminasi yang terjadi dan tindakan yang diambil/dilakukan.
	Aspek: Kebebasan Berserikat dan Berunding Bersama Berkumpul
	HR5: Segala kegiatan berserikat dan berkumpul yang di teridentifikasi dapat menimbulkan risiko yang signifikan serta tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut.
	Aspek: Pekerja Anak
	HR6: Kegiatan yang identifikasi mengandung risiko yang signifikan dapat menimbulkan terjadinya kasus pekerja anak, dan langkah-langkah yang diambil untuk mendukung upaya penghapusan pekerja anak.
Aspek: Kerja Paksa dan Kerja Wajib	

INDIKATOR KINERJA	ASPEK
	<p>HR7: Kegiatan yang teridentifikasi mengandung risiko yang signifikan dapat menimbulkan kasus kerja paksa atau kerja wajib, dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mendukung upaya penghapusan kerja paksa atau kerja wajib.</p>
	<p>Aspek: Praktik/Tindakan Pengamanan</p>
	<p>HR8: Persentase personel penjaga keamanan yang terlatih dalam hal kebijakan dan prosedur organisasi terkait dengan aspek HAM yang relevan dengan kegiatan organisasi.</p>
	<p>Aspek: Hak Penduduk Asli</p>
	<p>HR9: Jumlah kasus pelanggaran yang terkait dengan hak penduduk asli dan langkah-langkah yang diambil.</p>
	<p>Aspek: Penilaian</p>
	<p>HR10: Persentase dan jumlah total pelaksanaan penilaian atau peninjauan yang berhubungan dengan hak asasi manusia.</p>
	<p>Aspek: Remediasi</p>
<p>SOSIAL</p>	<p>HR11: Jumlah keseluruhan mengenai hak asasi manusia yang telah diselesaikan oleh mekanisme keluhan.</p>
	<p>Aspek: Komunitas</p>
	<p>S01: Sifat dasar, ruang lingkup, dan keefektifan setiap program dan praktik yang dilakukan untuk menilai dan mengelola dampak operasi terhadap masyarakat, baik pada saat memulai, pada saat beroperasi, dan pada saat mengakhiri.</p>
	<p>S09: Operasi yang berpotensi atau memberikan dampak</p>

INDIKATOR KINERJA	ASPEK
	negatif kepada komunitas lokal.
	SO10: upaya pencegahan dan peringatan terhadap penerapan potensi operasi yang berpotensi memberikan dampak negatif.
	Aspek: Korupsi
	SO2: Persentase dan jumlah unit usaha yang memiliki risiko terhadap korupsi.
	SO3: Persentase pegawai yang dilatih dalam kebijakan dan prosedur antikorupsi.
	SO4: Tindakan yang diambil dalam menanggapi kejadian korupsi.
	Aspek: Kebijakan Publik
	SO5: Kedudukan kebijakan publik dan partisipasi dalam proses melobi dan pembuatan kebijakan publik.
	SO6: Nilai kontribusi finansial dan natura kepada partai politik, politisi, dan institusi terkait berdasarkan negara di mana perusahaan beroperasi.
	Aspek: Kelakuan Tidak Bersaing
	SO7: Jumlah tindakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan anti persaingan, anti-trust, dan praktik monopoli serta sanksinya.
	Aspek: Kepatuhan
PRODUK	SO8: Nilai uang dari denda signifikan dan jumlah sanksi non moneter untuk pelanggaran hukum dan peraturan yang dilakukan

INDIKATOR KINERJA	ASPEK
	Aspek: Kesehatan dan Keamanan Pelanggan
	PR1: Tahapan daur hidup di mana dampak produk dan jasa yang menyangkut kesehatan dan keamanan dinilai untuk penyempurnaan, dan persentase dari kategori produk dan jasa yang penting yang harus mengikuti prosedur tersebut.
	PR2: Jumlah pelanggaran terhadap peraturan dan etika mengenai dampak kesehatan dan keselamatan suatu produk dan jasa selama daur hidup, per produk.
	Aspek: Pemasangan Label bagi Produk dan Jasa
	PR3: Jenis informasi produk dan jasa yang dipersyaratkan oleh prosedur dan persentase produk dan jasa yang signifikan yang terkait dengan informasi yang dipersyaratkan tersebut.
	PR4: Jumlah pelanggaran peraturan dan <i>voluntary codes</i> mengenai penyediaan informasi produk dan jasa serta pemberian label, per produk.
	PR5: Praktik yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan termasuk hasil survei yang mengukur kepuasan pelanggan.
	Aspek: Komunikasi Pemasaran
	PR6: Program-program untuk ketaatan pada hukum, standar dan <i>voluntary codes</i> yang terkait dengan komunikasi pemasaran, termasuk periklanan, promosi, dan sponsor ship.
	PR7: Jumlah pelanggaran peraturan dan <i>voluntary codes</i> sukarela mengenai komunikasi pemasaran termasuk periklanan, promosi, dan sponsor ship, menurut produknya
	Aspek: Keleluasaan Pribadi (<i>privacy</i>) Pelanggan

INDIKATOR KINERJA	ASPEK
	PR8: Jumlah keseluruhan dari pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran keleluasaan pribadi (<i>privacy</i>) pelanggan dan hilangnya data pelanggan.
	Aspek: Kepatuhan
	PR9: Nilai moneter dari denda pelanggaran hukum dan peraturan mengenai pengadaan dan penggunaan produk dan jasa.

2.1.6.8 Tujuan Pembuatan *Sustainability Report*

Menurut Jalal (2010) dalam Idah (2013), pembuatan dan penyebaran *sustainability report* (Laporan Berkelanjutan) memiliki tujuan sebagai berikut:

1. “Meningkatkan reputasi terkait dengan transparansi dan akuntabilitas.
2. Menjangkau berbagai pemangku kepentingan, agar mereka bisa mendapatkan informasi yang benar, sehingga perlu disebarluaskan melalui berbagai cara (internet, media cetak, *stakeholder convening*, dan sebagainya).
3. Membantu perusahaan untuk mengambil keputusan manajemen dalam memperbaiki kinerja pada indikator yang masih lemah.
4. Membantu investor untuk mengetahui kinerja perusahaan secara lebih menyeluruh.”

2.1.6.9 Metode Pengukuran *Sustainability Report*

Pengungkapan *sustainability report* masih bersifat sementara (*voluntary*) artinya belum ada standar baku yang memuat cara pengungkapannya sehingga hal ini dikembalikan kepada kebijakan dari pihak manajemen masing-masing perusahaan. *Sustainability report* dapat dinilai dari seberapa banyak indikator-

indikator yang dapat diungkapkan dalam laporan tersebut. Semakin banyak indikator yang diungkapkan dalam *sustainability report* maka semakin bagus kualitas dari *sustainability report* tersebut.

Menurut Cooke (1989) dalam Dian (2014) rumus perhitungan pengungkapan *Sustainability Report* adalah sebagai berikut:

$$SRDI = \frac{n}{k}$$

Keterangan:

SRDI = *Sustainability Report Disclosure Index*

n = Total Item yang diungkapkan oleh perusahaan

k = Total keseluruhan item yang disyaratkan oleh GRI, k= 91

Standar yang sering digunakan oleh perusahaan dalam melaporkan keberlanjutan perusahaan mereka yaitu *Global Reporting Initiatives* (GRI). Adapun standar GRI yang berlaku sekarang adalah GRI G4 yang merupakan penyempurnaan dari standar-standar sebelumnya. GRI G4 memberikan prinsip-prinsip dalam mendefinisikan isi laporan dan menjamin kualitas dari informasi yang dilaporkan dalam hal pelaporan berkelanjutan perusahaan. Kerangka pelaporan yang disusun dalam *Global Reporting Initiative* membagi aspek pelaporan ke dalam enam aspek, dimana setiap aspek berisi protokol indikator (indikator kinerja). Keenam aspek atau indikator tersebut adalah indikator kinerja

ekonomi, indikator kinerja lingkungan hidup, indikator kinerja praktik ketenagakerjaan dan lingkungan kerja, indikator kinerja hak asasi manusia, indikator kinerja masyarakat, dan indikator kinerja tanggung jawab produk.

Kriteria Pengungkapan *Sustainability Report*

Jumlah item	Dalam Persentase	Kriteria Pengungkapan
1-27	1,2%-32,1%	Sangat sedikit
28-55	33,3%-65,5%	Sedikit
56-83	66,7%-98,8%	Banyak
>84	>100%	Penuh

Sumber : Modifikasi *Global Reporting Initiative*

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian mengenai praktik pengungkapan *sustainability report* telah banyak mengalami perkembangan. Penelitian-penelitian sebelumnya telah mencoba menelaah lebih luas mengenai praktik pengungkapan *sustainability report* yang dilakukan dengan variasi jenis perusahaan yang berbeda-beda. Di Indonesia sendiri, penelitian mengenai praktik pengungkapan *sustainability report* masih tergolong pada fase awal.

Kebanyakan penelitian-penelitian di Indonesia, lebih mengarah untuk meneliti bagaimana praktik pengungkapan *sustainability report* berdasarkan standar yang dikembangkan *Global Reporting Initiative* (GRI). Beberapa penelitian telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan *profitabilitas*, ukuran perusahaan, dan komite audit serta pengungkapan *sustainability report*. Penelitian

tersebut memiliki hasil yang berbeda dan penelitian tersebut dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Hari Suryono dan Andri Prastiwi (2011)	Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan <i>Corporate governance</i> terhadap Praktik Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	Terdapat pengaruh positif signifikan yang ditimbulkan oleh variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, dewan direksi, dan komite audit. Sedangkan variabel seperti likuiditas, <i>leverage</i> , aktivitas, dan <i>governance committee</i> tidak memberikan pengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> suatu perusahaan.
2	Mega Putri Yustia Sari (2013)	Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan, dan <i>Corporate Governance</i> terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	Variabel Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> . Variabel komite audit dan dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> . Sedangkan variabel likuiditas, <i>leverage</i> , aktivitas perusahaan, ukuran perusahaan dan dewan direksi tidak menunjukkan pengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> .

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
3	Adistira Sri Aulia (2013)	Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Praktik Pengungkapan <i>Sustainability Reporting</i> dalam Laporan Tahunan Perusahaan Publik di Indonesia	Variabel <i>size</i> dan <i>type</i> memiliki pengaruh terhadap <i>sustainability reporting disclosure</i> . Sedangkan variabel profitabilitas dan <i>leverage</i> tidak memiliki pengaruh terhadap <i>sustainability reporting disclosure</i> .
4	Chintya Dwi Putri (2012)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> dan Karakteristik Perusahaan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam <i>Sustainability Report</i> (Studi Empiris Perusahaan yang Terdaftar di BEI Periode 2008-2011)	Proporsi dewan komisaris independen dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di dalam <i>sustainability report</i> . Kepemilikan asing berpengaruh signifikan negatif, sedangkan umur perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di dalam <i>sustainability report</i> .
5	Azwir Nasir, Elfi Ilham, dan Vadela Irna Utara (2014)	Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan <i>Corporate Governance</i> terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	Variabel <i>Return on Asset</i> , <i>Debt to Equity Ratio</i> , dan <i>Governance Committee</i> berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan (<i>sustainability report</i>),

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Pada Perusahaan LQ45 yang Terdaftar	sedangkan <i>current inventory turnover</i> , komite dan direksi berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan (<i>sustainability report</i>).
6	Fadhila Adhipradana (2014)	Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan, dan <i>Corporate Governance</i> terhadap Pengungkapan Sustainability Report	Variabel- variabel total aset (TA), total karyawan (TK), dan <i>governance committee</i> (GC) terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> . Sementara profitabilitas (ROA), likuiditas (CR), <i>dividend payout ratio</i> (DPR), komite audit, dewan komisaris, kepemilikan manajemen maupun kepemilikan asing bagi perusahaan tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i>
7	Abdul Azis (2014)	Analisis Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> (Gcg) Terhadap Kualitas Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	Variabel yang berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan <i>sustainability report</i> hanya kepemilikan saham manajerial yaitu memiliki pengaruh positif signifikan. Sedangkan,

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			variabel lainnya seperti ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, ukuran komite audit, kepemilikan saham institusional, kepemilikan saham terkonsentrasi dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh.
8	Idah (2013)	Corporate Governance dan Karakteristik Perusahaan dalam Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	Variable dewan direksi, <i>governance committee</i> , profitabilitas dan ukuran perusahaan <i>sustainability report</i> , sedangkan variable dewan komisaris, komite audit, likuiditas, <i>leverage</i> dan aktivitas perusahaan tidak memiliki peran dalam pengungkapan <i>sustainability report</i> .
9	Ana Wahyuningsih dan Nera Marida (2018)	Pengaruh size, Leverage dan Profitabilitas terhadap Pengungkapan CSR Pada perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Variabel ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial(CSR) perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
10	Romi Fahriza	Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan sustainability report pada perusahaan High Profil di Bursa Efek Indonesia	Variabel Leverage berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sustainability report. Variabel profitabilitas dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sustainability report.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba sehingga dapat meningkatkan nilai pemegang saham perusahaan. Semakin tinggi rasio profitabilitas, maka semakin tinggi pula informasi yang diberikan oleh manajer. Hal ini dikarenakan pihak manajemen ingin meyakinkan investor mengenai profitabilitas dan kompetensi manajer. Pada saat tingkat profitabilitas rendah, para pengguna laporan akan membaca “*good news*” kinerja perusahaan, misalnya dalam lingkup sosial dan dengan demikian investor akan tetap berinvestasi di perusahaan tersebut (Rusdianto, 2013:46).

Hasil penelitian Luciana Spica Amalia (2008) menunjukkan bahwa Profitabilitas berpengaruh terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*. Profitabilitas perusahaan adalah merupakan indikator pengelolaan manajemen perusahaan yang baik, sehingga manajemen akan cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi ketika ada peningkatan profitabilitas perusahaan. Hal lain yang mendukung hubungan positif antara profitabilitas dengan tingkat pengungkapan sukarela adalah adanya sumber daya keuangan yang lebih besar bagi perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi untuk menyajikan pengungkapan lain selain yang diwajibkan (sukarela). Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung untuk mengungkapkan lebih banyak karena ingin menunjukkan kepada publik dan *stakeholders* bahwa perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi dibandingkan dengan perusahaan lain pada

industri yang sama.

Penelitian Suryono dan Prastiwi (2011) menemukan hubungan positif antara profitabilitas dengan inisiatif manajer dalam mengungkapkan *sustainability report*. Ini dikarenakan pihak manajemen ingin meyakinkan investor mengenai profitabilitas dan kompetensi manajemen. Pengungkapan *sustainability report* ini dilakukan dalam rangka pertanggungjawaban kepada *stakeholder* untuk mempertahankan dukungan mereka dan juga untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka. Selain itu pengungkapan *sustainability report* juga dapat digunakan sebagai media komunikasi dengan para *stakeholder*, yang ingin memperoleh keyakinan tentang bagaimana profit dihasilkan perusahaan. Informasi ini terutama penting bagi *stakeholder* selain investor dan kreditor yang biasanya dimotivasi oleh kepentingan ekonomi atau *financial*.

2.2.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

Menurut Fery dan Jones dalam Faizatul Hasanah, Bestari Dwi dkk (2014) mengatakan bahwa ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan, dan rata-rata total aktiva. Salah satu upaya yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mencapai *sustainable growth* adalah dengan melalui pembuatan *sustainability report*. *Sustainability report* digunakan perusahaan untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan praktik sosial lingkungan. Pengungkapan laporan ini juga termasuk bagaimana praktik CSR yang telah

dirancang dan direalisasi oleh manajer. Semakin besar suatu perusahaan akan memunculkan pengeluaran yang lebih besar dalam mewujudkan *legitimasi* perusahaan, hal ini disebabkan karena perusahaan akan cenderung mengungkapkan informasi yang lebih luas. Menurut Yunita Ratnasari (2011) ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report* pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan keberlanjutan (*sustainability report*) merupakan masalah kebajikan sosial dan dasarnya adalah *voluntary*. Keputusan untuk melakukan suatu tanggung jawab sosial dan untuk mengungkapkannya merupakan kebijakan manajemen

Penelitian Idah (2013) dan penelitian Adhipradana (2014) juga berhasil membuktikan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*. Idah dan Adhipradana menggunakan logaritma natural total aset sebagai pengukuran ukuran perusahaan. Total aset adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki oleh entitas bisnis atau usaha. Semakin besar total aset perusahaan maka perusahaan tersebut dapat dikategorikan perusahaan besar. Total aset perusahaan yang meningkat berarti kekayaan perusahaan meningkat. Dengan total aset yang besar, perusahaan memiliki daya yang lebih besar untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Pengungkapan informasi sosial pada *sustainability report* merupakan salah satu cara untuk mendapatkan legitimasi masyarakat.

Perusahaan dengan total aset yang meningkat menunjukkan bahwa kekayaan perusahaan meningkat, sehingga dapat lebih banyak kontribusi pada

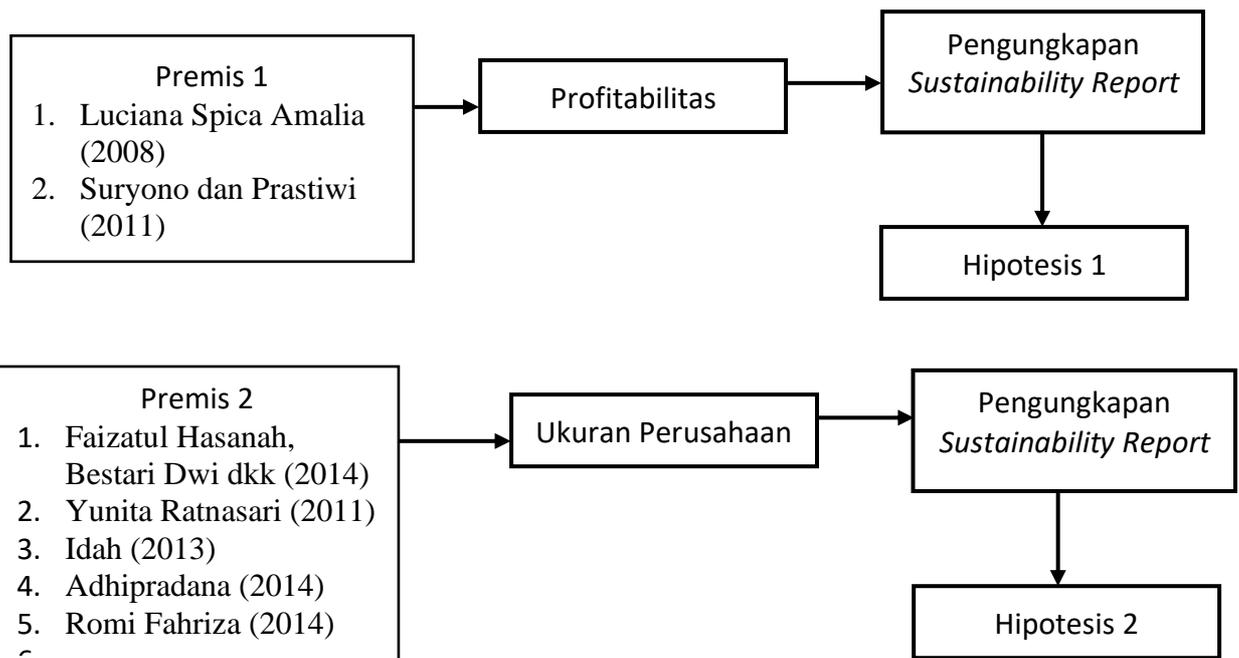
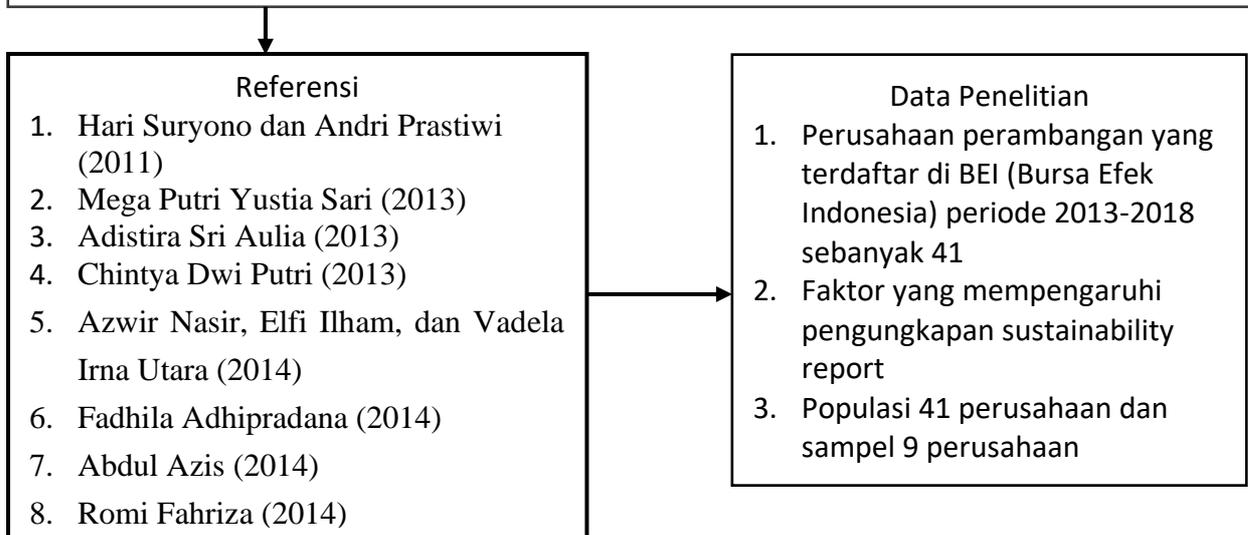
kegiatan sosial untuk mendapatkan legitimasi publik. Dengan semakin banyak kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan maka semakin banyak pula informasi yang dapat digunakan dalam *sustainability report*.

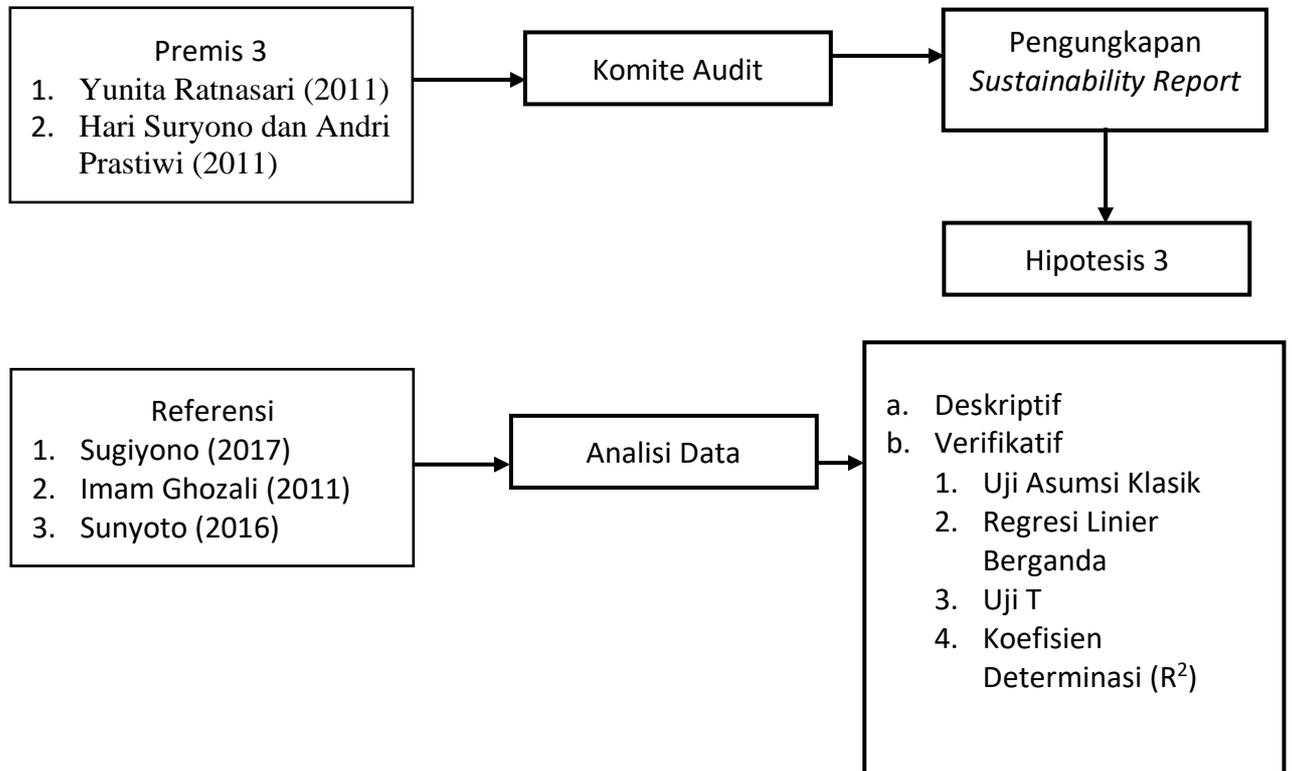
2.2.3 Pengaruh Komite Audit Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

Komite audit merupakan komite yang bertugas membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen. Berdasarkan keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-29/PM/2004 dalam peraturan Nomor IX.I.5 disebutkan bahwa komite audit yang dimiliki oleh perusahaan minimal terdiri dari tiga orang di mana sekurang-kurangnya satu orang berasal dari anggota komisaris independen dan dua orang lainnya berasal dari luar emiten atau perusahaan publik. Komite audit merupakan alat yang efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan, sehingga dapat mengurangi biaya agensi dan meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan (Foker, 1992 dalam Yunita Ratnasari (2011)). Penelitian yang dilakukan oleh Hari Suryono dan Andri Prastiwi (2011) menyatakan bahwa keberadaan komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) yang dilakukan perusahaan. Dengan demikian, dengan ukuran komite audit yang semakin besar diharapkan pengawasan yang dilakukan akan semakin baik dan dapat meningkatkan pengungkapan informasi sosial yang dilakukan oleh perusahaan.

2.2.4 Gambar Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka pemikiran maka didapat gambar kerangka penelitian sebagai berikut:





Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Komite Audit Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report* antara lain:

Hipotesis 1 = Terdapat pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan
sustainability report.

Hipotesis 2 = Terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan
sustainability report

Hipotesis 3 = Terdapat pengaruh Komite Audit terhadap pengungkapan
sustainability report